

## **Dukungan Indonesia dalam Konflik Berkepanjangan Israel dan Palestina**

**Afri Emilia Br Sembiring<sup>1</sup> Kemala Oktreza<sup>2</sup>**

Program Studi Diplomasia Pertahanan, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: [afriemilia.s@gmail.com](mailto:afriemilia.s@gmail.com)<sup>1</sup> [kemalaoktreza@gmail.com](mailto:kemalaoktreza@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Palestina adalah sebuah negara di Timur Tengah yang status politiknya masih dalam perdebatan. Sebagian negara di dunia termasuk ASEAN telah mengakui keberadaan negara Palestina, namun masih ada beberapa negara di dunia termasuk Amerika Serikat belum mengakui keberadaan negara Palestina. Hal ini kemudian juga menjadi salah satu alasan konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Konflik ini telah berlangsung ratusan tahun, sejak akhir abad ke-19 hingga abad ke-21 saat ini. Oktober 2023 merupakan awal mula konflik Israel dan Palestina kembali menjadi pembicaraan yang sangat serius dalam dunia Internasional menjelang akhir tahun 2023. Sebagai negara yang telah memiliki hubungan dengan Timur Tengah termasuk Palestina sejak masa sebelum kemerdekaan, Indonesia memiliki peran dalam solusi damai yang diharapkan terjadi di Israel dan Palestina. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dukungan negara Indonesia dalam menyikapi konflik yang berkepanjangan antara Israel-Palestina. Mengapa konflik ini tidak kunjung berakhir? Apakah konflik ini memiliki potensi untuk berakhir? Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi deskriptif dan analisis oleh penulis.

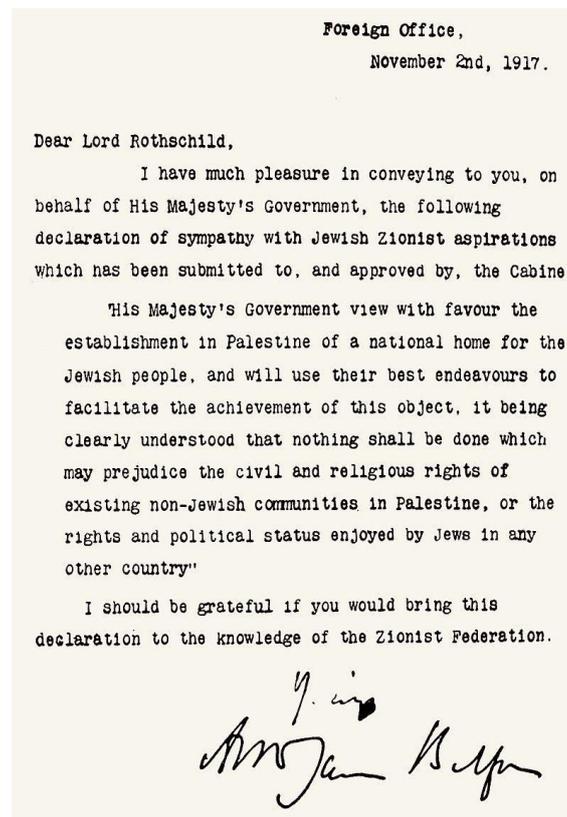
**Kata Kunci:** Konflik, Israel, Palestina, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### **PENDAHULUAN**

Palestina merupakan salah satu bagian dari wilayah di kawasan Timur Tengah. Wilayah Palestina berbatasan dengan Laut Tengah disebelah barat, Sungai Yordan disebelah timur, Mesir disebelah selatan, dan Libanon disebelah utara. Sebagian besar orang Palestina adalah keturunan orang Philistine dan Kan'an. Seiring dengan berjalannya waktu, para imigran Yahudi pun mulai berdatangan ke wilayah Palestina (Nurjannah & M. Fakhrudin, 2019). Perselisihan kedua bangsa kemudian mulai timbul atas klaim mengenai siapa yang memiliki hak untuk berada di wilayah Palestina tersebut. Deklarasi Balfour menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah konflik Israel-Palestina. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 berkaitan dengan situasi politik global yaitu Perang Dunia I. Saat itu Inggris membutuhkan bantuan gerakan Zionis Internasional akan keperluan Perang, sebaliknya, mereka juga meminta imbalan berupa tanah Palestina. Janji akan tanah tersebut kemudian diberikan Inggris melalui Deklarasi Balfour tersebut (Bus, 2017). Adapun isi dari Deklarasi Balfour dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

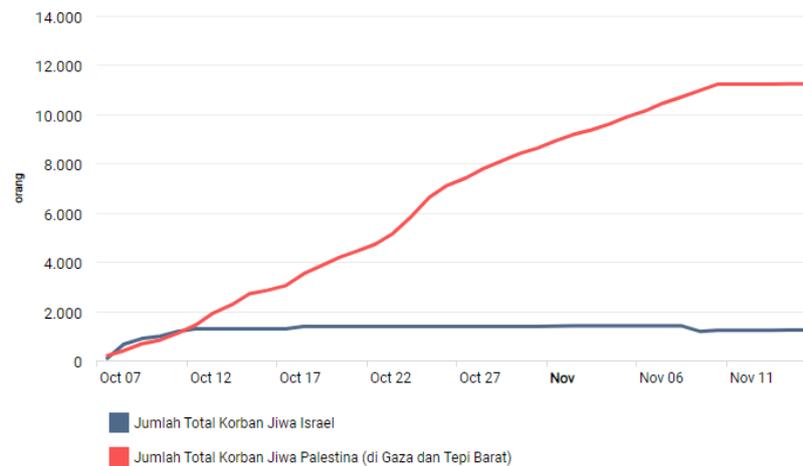


**Gambar 1. Deklarasi Balfour**

Wilayah Palestina, dengan luas sekitar 27.000 km<sup>2</sup>, memiliki posisi geografis strategis sebagai penghubung antara benua Asia, Afrika, dan Eropa. Konflik antara Israel dan Palestina, meskipun sering dianggap sebagai konflik agama, sebenarnya bermula dari perebutan tanah di wilayah Palestina. Bangsa Yahudi, memandang Palestina sebagai tanah yang dijanjikan, berusaha mendirikan negara mereka di sana, khususnya dengan harapan Yerusalem menjadi ibukota Israel. Setelah Kekuasaan Turki Usmani diambil alih oleh Inggris setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa memberikan hak kepada Inggris untuk mengelola wilayah Palestina hingga kemandirian Palestina tercapai. Namun, implementasi janji pemerintahan sendiri bagi Yahudi dan Bangsa Arab justru memicu konflik dan bentrokan. Banyaknya imigran Yahudi ke Palestina, terutama setelah Deklarasi Balfour pada 1917, dan proklamasi berdirinya negara Israel pada 1948, semakin menguatkan tekad Palestina untuk mempertahankan tanah mereka dari pengakuan negara Israel oleh berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat (Nurjannah & M. Fakhruddin, 2019). Berdirinya negara Israel berasal dari gerakan Zionisme politik, dengan upaya mendapatkan tanah air. Deklarasi Balfour pada 1917 oleh Inggris dan penaklukan Palestina pada 1918 membuka jalan bagi negara Israel. Mandat Palestina diberikan kepada Inggris oleh PBB pada 1919, dan pada 1947, PBB secara sewenang-wenang membagi wilayah Palestina. Akhirnya, pada 1948, negara Israel dideklarasikan di bagian dari tanah Palestina, memenuhi aspirasi zionis untuk memiliki negara independen (Satrianingsih & Abidin, 2016).

Perang telah dipilih oleh Israel dan Palestina sebagai salah satu cara dalam penyelesaian konflik mereka (Badjodah et al., 2021). Perang Israel - Palestina pertama kali pecah pada tahun 1948, terus berlanjut dengan perang 1957, 1963, 1967, 1973, 1982, 1993, 2002, 2003, 2013 hingga 2021, dan 2023 saat ini. Oktober 2023 merupakan awal mula konflik Israel dan Palestina kembali menjadi pembicaraan yang sangat serius dalam dunia Internasional menjelang akhir tahun 2023. Perang berkembang semakin sengit akibat masing-masing pihak

merasa memiliki kewenangan untuk terus melancarkan serangan. Israel menyebutkan bahwa serangan yang mereka lakukan merupakan respon balasan atas serangan yang dilakukan Hamas pada 7 Oktober 2023. Sebaliknya, Hamas menyebutkan bahwa serangan yang mereka lakukan merupakan balasan atas segala bentuk kekerasan dan ketidakadilan yang telah dilakukan Israel kepada warga Palestina selama bertahun-tahun belakangan. Berdasarkan *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (OCHA), dalam satu bulan terakhir, konflik antara Israel-Palestina telah menewaskan sekitar 12.000 jiwa (Ahdiat, 2023), seperti yang ditampilkan pada gambar dibawah ini:

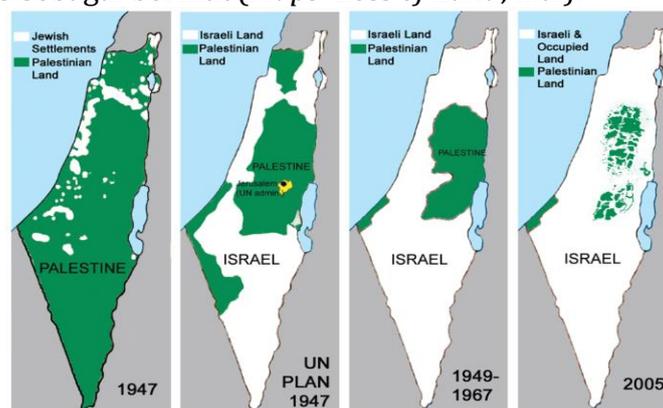


**Gambar 2. Grafik Korban Jiwa Perang Israel-Palestina yang Dilaporkan**

Seiring dengan berjalannya konflik Israel-Palestina, korban jiwa terus berjatuh. Pelanggaran hak asasi manusia telah terjadi. Kebebasan untuk memiliki kehidupan yang layak dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, agama, maupun kesehatan sulit ditemukan. Adapun Dewan Keamanan PBB telah berupaya terhadap resolusi konflik diantara keduanya namun peranan PBB dinilai tidak efektif (Islamiyah, 2016). Keterlibatan PBB telah dimulai sejak tahun 1947, melalui upaya pemisahan Palestina menjadi Negara Yahudi dan Negara Arab melalui Resolusi 181. Adapun resolusi tersebut ditolak oleh Palestina. Serangkaian upaya lain yang telah ditempuh oleh PBB meliputi dikeluarkannya resolusi no 242, 338, perjanjian Camp David 1978, konferensi internasional tentang masalah Palestina 1981, intifada, konferensi Madrid 1991, dan perjanjian Oslo 1995. Dalam penelitiannya, Nur Islamiyah juga mendapati kesulitan perdamaian yang jauh dari pencapaiannya diiringi oleh keikutsertaan Amerika Serikat terkait hak Veto yang Ia miliki. Kurangnya dukungan dari bangsa Arab sendiri dimana terjadi konflik internal yang terjadi antara Hamas dan Fatah yang memiliki perbedaan pandangan menjadi hambatan lain sehingga konflik ini sulit diselesaikan. Israel terus menyerang Palestina karena menganggap serangan tersebut sebagai ancaman terhadap kedaulatan negaranya. Ketika Hamas melakukan serangan pada 7 Oktober, Israel merasa bahwa keamanan dan eksistensi negaranya berada dalam bahaya. Sejarah yang melibatkan pemberian tanah Palestina kepada Israel, bersama dengan pengalaman penindasan yang dialami selama periode Holocaust, membuat Israel merasa perlu menjadi lebih kuat demi kelangsungan hidup mereka. Dalam konteks ini, serangan dan respons militer Israel dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional mereka.

Indonesia telah memiliki hubungan dengan Timur Tengah termasuk Palestina sejak masa sebelum kemerdekaan. Salah satunya ditandai dengan hubungan pendidikan dimana banyak pemuda Indonesia yang berangkat ke Timur Tengah, baik Mesir maupun Arab untuk

melakukan pencarian ilmu kepada Ulama-ulama di sana (Mudore, 2019). Selain karena sejarah hubungan erat yang telah terjalin lama, cita-cita Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang akan selalu mendukung dan membantu menyokong kemerdekaan sebuah bangsa. Sedangkan dalam membangun komunikasi dengan Israel, Indonesia memilih untuk tidak membuka jalur diplomasi dengan Israel namun tidak sepenuhnya menolak hubungan dengan Israel, bergantung pada kepentingan nasional Indonesia. Perang Israel-Palestina merupakan konflik kemanusiaan yang berkepanjangan. Berbagai resolusi dan kesepakatan damai yang pernah dibuat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Menurut Badjodah, terdapat dua faktor yaitu internal dan eksternal yang memengaruhi kesulitan perdamaian. Faktor internal yaitu tokoh dan kelompok yang berpengaruh dalam sistem sosial dan politik, serta persatuan negara Arab yang hilang dan faktor eksternal yaitu kehadiran Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya (Badjodah et al., 2021). Jika perang terus berlanjut, potensi kekalahan Palestina lebih besar dibandingkan Israel. Ketidakeimbangan alat perang yang dimiliki Palestina juga merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan kekalahan Palestina. Sejak perang dimulai, wilayah Palestina terus berubah. Melalui *Palestine Portal* kita dapat melihat gambar perubahan wilayah tanah Palestina dan Israel sejak 1947-2005 sebagai berikut (*Maps: Loss of Land, n.d.*):



**Gambar 3. Peta Wilayah Palestina dan Israel**

Konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina telah berlangsung selama lebih dari setengah abad tanpa adanya kejelasan mengenai akhir cerita. Sikap keras kepala Israel telah memungkinkan mereka menguasai sebagian besar tanah Palestina, sementara cita-cita Zionis untuk mendirikan Negara Yahudi seperti bertujuan untuk menghapus Palestina dari ingatan dunia. Meskipun Palestina aktif berjuang untuk mendapatkan kembali tanah kelahirannya, upaya mereka terhambat oleh dukungan kuat yang diberikan oleh Amerika Serikat kepada Israel. Dalam konteks ini, Indonesia memainkan peran penting dalam mengawal konflik Israel-Palestina. Negara ini telah aktif sebagai co-sponsor, fasilitator, mediator, partisipator, inisiator, aktor, motivator, dan justifikator, berusaha untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina. Meskipun demikian, tantangan tetap besar mengingat veto yang sering diberikan oleh Amerika Serikat terhadap upaya Palestina di panggung dunia PBB (Mudore, 2019). Pada dasarnya, Indonesia mendukung solusi dua negara, dimana Palestina dan Israel dapat hidup berdampingan secara damai dan terhapusnya penjajahan. Indonesia hanya dapat memberikan solusi, pada akhirnya Palestina dan Israel lah pemain yang harus menyetujui solusi yang diberikan atau mempertimbangkan solusi seperti apa yang terbaik untuk kedua belah pihak tanpa memusnahkan salah satu pihak. Melalui hubungan Indonesia dan Palestina yang telah berlangsung lama, Indonesia memiliki peran persuasif untuk mencapai solusi damai.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan jenis penelitian antara lain: Studi Deskriptif, Studi Literasi, dan Studi Kasus. Proses analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, dan penyajian data. Setelah melakukan studi deskriptif, penulis kemudian melakukan analisis dan menyajikan dalam tulisan yang komprehensif terkait dukungan Indonesia dalam konflik Israel dan Palestina dan potensi berakhirnya perang antara Israel dan Palestina.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dukungan Internasional**

Dukungan untuk Palestina telah datang dari berbagai negara, termasuk negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Iran, Rusia, dan China. Mereka secara aktif mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia juga telah menunjukkan dukungan yang konsisten baik secara politik maupun melalui berbagai bentuk bantuan kemanusiaan. Selain itu, puluhan ribu pengunjung rasa pro-Palestina di berbagai negara telah menyuarakan tuntutan untuk gencatan senjata dalam konflik antara Israel dan Hamas, mencerminkan solidaritas global dengan isu tersebut. Disamping itu, Israel mendapatkan dukungan yang signifikan dari berbagai negara, terutama dari Amerika Serikat dan sekutunya seperti Inggris, Prancis, dan India, yang memberikan dukungan penuh kepadanya. Disisi lain, Uni Eropa juga mengutuk serangan yang dilakukan oleh Hamas dan menekankan solidaritas terhadap Israel. Sejumlah negara Arab seperti Uni Emirat Arab, Yordania, Bahrain, Oman, Qatar, Kuwait, Mesir, dan Maroko mengecam serangan yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Dukungan dari berbagai pihak ini jelas mencerminkan kompleksitas dinamika politik dan geopolitik di Timur Tengah, khususnya konflik Israel-Palestina dengan berbagai kepentingan politik, ekonomi, dan keamanan yang terlibat. Tantangan dan hambatan dalam mencapai solusi dua negara untuk Israel dan Palestina kemudian menjadi faktor penting dalam dinamika konflik keduanya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, adapun berbagai upaya Internasional telah dilakukan dalam mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina. Resolusi 181 terkait pembagian dua negara, yaitu Israel dan Palestina, telah menjadi bagian penting dari upaya resolusi PBB. Pada tahun 1947, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 181 yang menetapkan pembagian wilayah Palestina menjadi negara Arab dan Yahudi. Palestina menolak pembagian tersebut, yang memicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948. Setelah itu, terdapat resolusi 242 yang dikeluarkan setelah Perang Enam Hari pada tahun 1967 yang menyerukan Israel untuk menarik pasukannya dari wilayah Palestina yang diduduki dan meminta agar semua pihak menghormati kedaulatan wilayah masing-masing. Berbagai upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel, termasuk Perjanjian Oslo pada 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Konferensi Perdamaian Madrid pada tahun 1991 yang membawa bersama para perwakilan dari Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk perundingan perdamaian, serta perundingan Camp David pada tahun 2000, yang telah melibatkan beragam inisiatif. Namun, sebagian besar dari usaha-usaha tersebut masih belum berhasil mencapai penyelesaian yang berkelanjutan. Pemerintah Indonesia juga telah memberikan dukungan terhadap berbagai inisiatif dan upaya internasional yang bertujuan mencapai perdamaian yang adil di antara Palestina dan Israel. Oleh karena itu, resolusi-resolusi PBB yang berkaitan dengan pembagian wilayah antara Israel dan Palestina telah menjadi elemen krusial dalam sejarah konflik tersebut, meskipun penyelesaiannya masih dihadapkan pada tantangan kompleks. Meskipun adanya resolusi-resolusi ini, konflik tetap berlanjut, dan kepatuhan kedua belah pihak terhadap resolusi-resolusi ini telah menjadi titik perdebatan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya perdamaian, pada kenyataannya proses perdamaian menghadapi berbagai tantangan. Upaya internasional untuk membawa perdamaian dalam konflik Israel-Palestina telah melibatkan resolusi PBB, rencana perdamaian, dan negosiasi, namun ketegangan konflik menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang rumit diimbangi dengan berbagai aktor lain yang terlibat.

### **Dukungan Indonesia**

Indonesia dengan tekad yang teguh dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan upaya mencari jalan damai antara Palestina dan Israel, secara berulang menyatakan dukungannya di forum-forum internasional. Di ranah politik, Indonesia telah menjadi suara yang signifikan dalam mendorong penyelesaian konflik Timur Tengah melalui solusi dua negara yang adil dan berkesinambungan. Upaya diplomasi ini tercermin dari peran aktif Indonesia di lembaga-lembaga seperti PBB, Liga Arab, OKI, serta ASEAN, di mana Indonesia terus berjuang untuk hak-hak rakyat Palestina dan menolak pendudukan Israel. Dalam kaitan ini, Indonesia telah menyokong usaha-usaha untuk memperoleh status keanggotaan Palestina ke-195 di UNESCO pada 31 Oktober 2011. Selanjutnya, Palestina berhasil meraih status "negara" (non-member observer state) dari sebelumnya yang hanya sebagai "entitas" (non-member observer entity) melalui keputusan Sidang Majelis Umum PBB pada 29 November 2012. Pada tahun 2015, Indonesia menjadi tuan rumah dua konferensi penting: pertama, Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika pada bulan April 2015 untuk merayakan 60 Tahun Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 yang diadakan oleh Pemerintah Indonesia, yang menghasilkan deklarasi khusus yang mendukung Palestina; dan kedua, International Conference on the Question of Jerusalem pada tanggal 14–15 Desember 2015, serta UN Civil Society Forum on the Question of Palestine pada tanggal 16 Desember 2015, acara-acara ini diselenggarakan oleh PBB dengan kerja sama dari OKI dan Pemerintah Indonesia di Jakarta (*Indonesia-Palestine*, n.d.).

Dalam Sidang Pleno ke-67 Sidang Majelis Umum PBB pada hari Jumat, 21 Mei 2021, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan beberapa langkah untuk menyelesaikan ketegangan antara Israel dan Palestina. Pemerintah Indonesia secara khusus mendesak Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kekerasan dan membentuk tim internasional di Yerusalem. Indonesia menegaskan bahwa usaha negosiasi untuk menghentikan pendudukan Israel di Palestina harus segera dijalankan, setelah tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Indonesia juga meminta PBB untuk menjamin akses bantuan kemanusiaan ke Palestina, dan mendorong dimulainya negosiasi multilateral yang dapat dipercaya. Selain itu, Indonesia juga mengambil langkah serius dengan mengeluarkan pernyataan bersama dengan Malaysia dan Brunei Darussalam yang mewakili ratusan juta umat Islam dunia. Pemerintah percaya bahwa meskipun konflik ini bukan masalah agama, namun pernyataan ini diharapkan dapat membantu Palestina melalui OKI, Gerakan Non-Blok, dan PBB (Widagdo & Kurniaty, 2021). Indonesia juga menunjukkan partisipasi aktifnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) luar biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi, pada Sabtu, 11 November 2023, di mana Presiden Jokowi menawarkan empat solusi untuk mengatasi agresi Israel terhadap wilayah pendudukan Palestina di Jalur Gaza. Solusi pertama yang diajukan presiden adalah agar gencatan senjata segera dilaksanakan. Solusi kedua adalah agar Indonesia meminta OKI untuk mendorong peningkatan dan perluasan bantuan kemanusiaan yang berkesinambungan ke Palestina. Solusi ketiga adalah agar Jokowi meminta OKI untuk menggunakan semua saluran untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas kejahatan kemanusiaan di Palestina. Solusi keempat adalah agar presiden mendesak OKI agar memulai kembali perundingan damai demi mencapai solusi dua negara atau two state solution (Yandwiputra, 2023).

Indonesia tidak hanya memberikan dukungan politik, tetapi juga memberikan bantuan kemanusiaan yang besar kepada rakyat Palestina. Dengan mengirimkan bantuan medis, logistik, dan finansial, Indonesia berusaha membantu korban konflik di wilayah Palestina. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi penderitaan rakyat Palestina yang mengalami dampak dari konflik yang berkepanjangan di wilayah tersebut. Di Amman, Yordania, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Walikota Kota Hebron, Tayser Abu Sneineh, meneken MOU untuk mendirikan rumah sakit Indonesia-Hebron di atas tanah waqaf seluas 4000 m<sup>2</sup>. Proyek ini memerlukan US \$6,745 juta, dengan MUI berjanji menyumbang US \$5,915 jt, dan sisanya dari sumbangan pemerintah Kota Hebron. Rumah sakit ini bertujuan untuk membantu 1,2 juta penduduk Hebron, khususnya dalam bidang fisioterapi dan rehabilitasi. Acara ini diikuti oleh perwakilan Palestina dan Indonesia, menunjukkan komitmen Indonesia dalam membantu penderitaan rakyat Palestina, terutama di tengah meningkatnya tekanan dari Israel (*Indonesia Bantu Pembangunan Rumah Sakit Indonesia Di Hebron*, 2020).

Indonesia juga memberikan bantuan lain berupa rencana pengiriman kapal rumah sakit dari TNI AL ke Mesir untuk menjadi fasilitas medis tambahan untuk menangani dan menyembuhkan korban perang di Gaza. Selain kapal rumah sakit, bantuan berupa makanan, obat-obatan, dan kebutuhan lainnya juga terus dikirim. TNI Angkatan Darat juga turut serta dalam memberikan bantuan, dengan 50 truk yang berisi berbagai macam keperluan kemanusiaan yang telah diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk disalurkan ke Palestina. Bantuan ini meliputi bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan kebutuhan pokok lainnya, yang telah melalui proses seleksi agar memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Proses pengiriman bantuan ini melibatkan kerjasama antara TNI, kementerian, lembaga, dan instansi lainnya. Pengiriman bantuan akan terus berlangsung, dengan kemungkinan menggunakan pesawat angkut berat C-130 Hercules milik TNI AU. Dua pesawat Hercules sebelumnya telah terbang ke Mesir dan berhasil menyelesaikan misi kemanusiaan sebelum kembali ke Indonesia (Andita, 2023).

Indonesia menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap Palestina melalui berbagai bentuk dukungan dari masyarakat sipil. Baik melalui demonstrasi, penggalangan dana, maupun kampanye kesadaran, masyarakat sipil Indonesia berdiri bersama rakyat Palestina yang berjuang. Salah satu contoh yang mengesankan adalah aksi damai yang diadakan di lapangan Monas, Jakarta, pada hari Minggu, 5 November 2023. Ribuan orang dari berbagai latar belakang agama, organisasi, dan partai politik berkumpul di sana untuk menyatakan dukungan mereka terhadap hak-hak warga Palestina. Dalam aksi yang terorganisir tersebut, Din Syamsuddin, seorang tokoh Muslim yang menjadi inisiator dari demonstrasi damai ini, menekankan bahwa aksi tersebut merupakan perwujudan dari kesatuan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Di antara peserta aksi, terdapat perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persatuan Umat Budha Indonesia (Permabudhi), Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), serta berbagai institusi pendidikan seperti universitas, perguruan tinggi, dan pondok pesantren. Aksi ini menunjukkan semangat persatuan lintas agama, kelompok, dan partai politik di Indonesia yang memiliki komitmen yang sama untuk mendukung Palestina. Semangat ini juga terlihat dari simbol-simbol yang digunakan, yang mencerminkan solidaritas yang tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap perjuangan warga Palestina (Yoga, 2023).

Indonesia juga berpartisipasi dalam upaya-upaya pendidikan dan kesadaran mengenai isu Palestina. Perang antara Israel dan Palestina mengakibatkan anak-anak pun menjadi korban. Hak-hak anak telah dirampas, tidak memiliki kebebasan, tidak dapat menempuh

pendidikan, tidak dapat merasakan ekonomi, hak hidupnya terganggu, hak untuk menjadi anak-anak sejawat tidak dapat dirasakan (Dewantara et al., 2023). Dengan memberikan beasiswa untuk pelajar Palestina, memberikan penyuluhan tentang isu Timur Tengah, dan meningkatkan kesadaran melalui berbagai media dan acara publik, Indonesia berusaha memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang konflik tersebut kepada masyarakatnya. Sebuah inisiatif penting telah diambil oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk mendukung kerja sama antara Indonesia dan Palestina. Kedatangan 22 calon kadet dari Palestina untuk mengikuti program beasiswa di Universitas Pertahanan merupakan salah satu langkah nyata dalam kerangka kerja sama ini. Program beasiswa ini adalah hasil dari upaya kolaboratif setelah pembicaraan yang berlangsung pada tahun 2022 antara perwakilan Kementerian Pertahanan dan Duta Besar Palestina. Fokus dari program ini adalah memberikan kesempatan kepada pemuda dan pemudi Palestina untuk menempuh pendidikan S1 di bidang-bidang seperti kedokteran militer, farmasi militer, teknik sipil, teknik tenaga listrik, teknik mesin, dan rekayasa keamanan informasi di Universitas Pertahanan Indonesia selama lima tahun ke depan. Pihak Kementerian Pertahanan menegaskan komitmennya untuk mendukung solidaritas dan kerja sama yang erat antara Indonesia dan Palestina. 22 pemuda tersebut didatangkan dalam rangka untuk memberikan kesempatan kepada pemuda Palestina untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Indonesia memastikan 22 mahasiswa ini bukan yang terakhir. Indonesia akan terus memberikan beasiswa kepada generasi muda Palestina (*Menhan Prabowo Terima 22 Mahasiswa Palestina Yang Akan Kuliah Dengan Beasiswa Di Unhan RI*, 2023).

Untuk membangun sebuah bangsa dan negara yang independen serta merdeka, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan secara mandiri. Mereka yang mendapatkan beasiswa akan memiliki kesempatan untuk memimpin negara mereka sendiri secara merdeka dan merumuskan kebijakan secara mandiri. Pembangunan sebuah bangsa yang baru memerlukan sumber daya manusia yang unggul, dari berbagai bidang, seperti ahli, dokter, insinyur, dan profesional lainnya. Inilah peran penting Indonesia dalam membuka peluang pendidikan bagi mereka. Diharapkan jalur ini terus terbuka sehingga dalam beberapa tahun mendatang, mereka akan menjadi penerus bangsa yang berkontribusi secara signifikan bagi negara mereka. Melalui penerimaan 22 mahasiswa Palestina dan pemberian beasiswa yang dilakukan Indonesia, harapannya para mahasiswa Palestina tersebut juga dapat belajar dan bertukar wawasan bersama mahasiswa Indonesia, hidup berdampingan, bekerjasama, menyokong perdamaian, tidak hanya bersama Indonesia, namun juga dengan Israel.

## **KESIMPULAN**

Damai di antara Israel dan Palestina berpotensi tercapai apabila kedua belah pihak bersedia untuk bekerjasama dan bernegosiasi. Kedua belah pihak perlu belajar untuk saling menerima dan mencari kesepakatan yang adil melalui konsep pembagian dua negara. Keterlibatan komunitas internasional juga menjadi kunci dalam mendukung proses perdamaian ini. Pilihan yang dihadapi oleh Israel dan Palestina sangat penting, yaitu antara mencapai kesepakatan damai yang memungkinkan kedua negara hidup berdampingan atau terus menerus berkonflik, dengan risiko mengakhiri eksistensi salah satu kaum tersebut. Solusi damai bukan hanya sebuah keinginan moral, tetapi juga merupakan satu-satunya jalan yang dapat membawa kemajuan dan keberlanjutan bagi kedua masyarakat di wilayah ini. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh Indonesia bukan hanya sekadar upaya memberikan bantuan fisik, tetapi juga mencerminkan tekad Indonesia untuk memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah. Tindakan ini menggambarkan kepedulian Indonesia terhadap kesulitan yang dihadapi

oleh masyarakat Palestina dan sekaligus sebagai dorongan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi proses perdamaian. Dalam konteks ini, diplomasi kemanusiaan menjadi penting, menciptakan jembatan antara negara-negara yang terlibat dan mengarahkan mereka menuju kesepakatan yang dapat mengakhiri konflik yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Selain negosiasi tingkat tinggi antara Israel dan Palestina, solusi damai juga melibatkan upaya konkret di tingkat masyarakat. Baru-baru ini, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian dengan menerima mahasiswa Palestina melalui Kementerian Pertahanan dan memberikan beasiswa. Pendidikan dianggap sebagai kunci untuk membentuk pemimpin masa depan yang dapat mendorong jalan damai. Semoga bantuan pendidikan ini tidak hanya memberikan manfaat individu bagi para mahasiswa Palestina, tetapi juga menjadi investasi dalam menciptakan generasi yang memiliki pemahaman mendalam tentang perdamaian dan keterlibatan positif dalam proses diplomasi. Dalam konteks ini, dukungan Indonesia melalui pendidikan memberikan harapan bahwa pemahaman yang lebih baik antara masyarakat Israel dan Palestina dapat tumbuh, membantu membangun jembatan komunikasi, dan membuka peluang bagi dialog yang konstruktif. Pendidikan menjadi alat untuk mengubah paradigma dan meredakan ketegangan, menyediakan landasan bagi pemahaman bersama, dan pada akhirnya, dapat menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun perdamaian yang berkelanjutan di Israel dan Palestina.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahdiat, A. (2023, November 16). Israel Terus Serang Palestina, Tambahan Korban Belum Diketahui. Databoks.
- Andita, R. A. (2023, November 9). Indonesia Terima 22 Mahasiswa Palestina untuk Belajar di Unhan. Lombok Post.
- Badjodah, A. F., Husen, M., & Ahmad, S. (2021). Dinamika Konflik dan Upaya Konsensus Palestina-Israel (Studi Kasus Perjanjian Perdamaian Oslo (Oslo Agreement) Tahun 1993). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 409–420. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.619>
- Bus, Y. (2017). Deklarasi Balfour, Lahirnya Sebuah Prasangka 100 Tahun: Mengenang Satu Abad Deklarasi Balfour 1917-2017. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 7(14), 15–40.
- Dewantara, J. A., Sulistyarini, Afandi, Warneri, & Efiani. (2023). Pelanggaran HAM Dalam Konflik Israel dan Palestina Berdampak Terhadap Hilangnya Hak Asasi Manusia Khususnya Hak Anak di Palestina. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1).
- Indonesia Bantu Pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Hebron. (2020, January 6). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Indonesia-Palstine. (n.d.). Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah.
- Islamiyah, N. (2016). Aspek Historis Peranan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Palestina Israel 1967-1995. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3).
- Maps: Loss of Land. (n.d.). Palestine Portal.
- Menhan Prabowo Terima 22 Mahasiswa Palestina yang akan Kuliah dengan Beasiswa di Unhan RI. (2023, November 8). Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Mudore, S. B. (2019). Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina. *Jurnal CMES*, 12(2), 170. <https://doi.org/10.20961/cmcs.12.2.37891>
- Nurjannah, E. P., & M. Fakhrudin. (2019). Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina. *PERIODE: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 1(1).

- Satrianingsih, A., & Abidin, Z. (2016). Sejarah Zionisme dan Berdirinya Negara Israel. *Jurnal Adabiyah*, 16(2), 172–184. <https://doi.org/10.24252/JAd.v17i116i2a7>
- Widagdo, S., & Kurniaty, R. (2021). Prinsip Responsibility to Protect (R2P) Dalam Konflik Israel-Palestina: Bagaimana Sikap Indonesia? *Arena Hukum*, 14(2), 314–327. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01402.6>
- Yandwiputra, A. R. (2023, November 19). Eks Dubes RI Sebut RI Punya Daya Tawar Selesaikan Konflik Palestina-Israel. *Tempo.Co*.
- Yoga, I. (2023, November 5). Gelar Aksi Bela Palestina, Ratusan Ribu Orang Padati Monas. *VOA Indonesia*.